

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Machmud (dalam Abidin, 2021, hlm. 57) mengatakan bahwa salah satu kebutuhan mendasar yang ada pada manusia adalah pendidikan, karena pendidikan mampu menumbuhkan berbagai potensi yang dimiliki oleh manusia. Begitu penting pendidikan ada pada suatu bangsa karena untuk membangun kemajuan suatu bangsa salah satunya tergantung pada pendidikannya. Pendidikan terus berkembang dan selalu dihadapkan dengan perubahan zaman. Pendidikan merupakan sarana yang dapat menunjang serta menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan berguna bagi masa depan bangsa. Oleh karena itu, generasi bangsa dapat bersaing dalam era globalisasi yang terus mengalami perkembangan. Banyak peneliti mulai mendesain pendidikan agar selaras dengan tantangan zaman, termasuk pendidikan Islam (Huda et al., 2022, hlm. 149).

Pada konteks pendidikan Islam, pendidikan juga memiliki peran penting dalam membentuk individu muslim yang berakhlak mulia. Pendidikan Islam merupakan sistem pendidikan yang mengintegrasikan prinsip-prinsip ajaran Islam dalam membentuk karakter individu dan masyarakat, dengan kata lain adalah pendidikan Islam dapat menjadi suatu pandangan hidup (Sudaryo, 2024, hlm. 1). Pendidikan Islam sebagai pandangan hidup mampu membentuk individu yang mempunyai karakter baik, dapat saling menghormati, dan toleransi terhadap berbagai perbedaan. Pendidikan Islam juga harus mampu menyesuaikan diri dalam menghadapi dunia yang semakin modern, dengan dihadapkan pada tantangan dan kebutuhan baru yang belum pernah ada sebelumnya. Sehingga perlu adanya inovasi terhadap sistem, tata kelola, kurikulum, kompetensi sumber daya manusia, infrastruktur, budaya, etos kerja, dan lain sebagainya (Priatmoko, 2018, hlm. 221).

Modernisasi pendidikan Islam merupakan proses penting dalam menghadapi perubahan zaman yang terus mengalami perkembangan. Hal ini sangat penting untuk dilakukan agar sistem pendidikan Islam dapat relevan dan responsif terhadap perkembangan dunia modern. Jika dilihat dari sudut sosiologi

dan antropologi, modernisasi selalu dikaitkan dengan perubahan pada budaya tradisional menjadi budaya modern. Jika dikaitkan dengan dunia pendidikan, modernisasi pendidikan merupakan suatu upaya untuk mengubah pendidikan Islam yang bersifat tradisional ke arah pendidikan yang bersifat modern. Modernisasi pendidikan Islam merupakan upaya pembaharuan lembaga-lembaga pendidikan tradisional yang mengadopsi aspek-aspek modern yang berkaitan dengan kurikulum, metode pendidikan, media, dan tata kelola pendidikan (Rozali, 2022, hlm. 30).

Dalam menghadapi tantangan global, modernisasi pendidikan Islam di pesantren pun melibatkan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi sebagai alat bantu yang digunakan dalam pembelajaran. Hal tersebut dapat membantu peserta didik untuk mengakses pengetahuan yang lebih luas secara efektif dan efisien. Dalam menghadapi perubahan zaman yang begitu cepat, kehidupan pesantren mengalami pergeseran ke arah perkembangan yang lebih positif, menyangkut pola kepemimpinan, pola hubungan pimpinan dengan santri, pola komunikasi, dan cara pengambilan keputusan yang lebih memperhatikan prinsip-prinsip manajemen ilmiah yang dilandasi dengan nilai-nilai Islam (Hasyim, 2016, hlm. 172).

Nilai-nilai Islam disuarakan melalui lembaga-lembaga atau organisasi masyarakat yang tersebar di Indonesia, dengan adanya organisasi masyarakat ini menjadi salah satu ciri khas antara kehidupan beragama dengan kehidupan sosial bermasyarakat di Indonesia Terdapat dua organisasi masyarakat di Indonesia yang memiliki pengaruh yang sangat signifikan bagi kehidupan beragama dan perkembangan sosial masyarakat, yaitu Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU). Muhammadiyah didirikan pada tanggal 18 November 1912 di Yogyakarta oleh seorang pendiri yang bernama KH. Ahmad Dahlan. Organisasi masyarakat yang didirikan oleh KH. Ahmad Dahlan ini merupakan gerakan pembaharuan Islam yang berfokus pada pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat (Ghozali, 2022, hlm. 73). Dalam bidang pemurnian tauhid misalnya KH. Ahmad Dahlan sering menyuarakan akidah dan ibadah umat Islam harus bersih dari unsur-unsur tercela seperti syirik, bidah, khurafat, dan takhayul (Daulai, 2019, hlm. 138). Salah satu visi dari organisasi ini yaitu mengenai modernisasi

pendidikan Islam untuk membawa kemajuan dan pembaharuan dalam pendidikan Islam di Indonesia. Dari visi tersebut, Muhammadiyah berupaya untuk mengembangkan sumber daya yang kompeten, mempunyai akhlak yang mulia, dan mempunyai semangat untuk berkontribusi secara positif dalam pembangunan bangsa.

Upaya ini dilakukan oleh KH. Ahmad Dahlan dalam modernisasi pendidikan Islam, KH. Ahmad Dahlan memperkenalkan pendekatan pendidikan berbasis modern yang artinya menggabungkan antara metode-metode pendidikan sekuler dengan pendidikan agama Islam. KH. Ahmad Dahlan sadar bahwasanya sistem pendidikan Islam di Indonesia pada periode penjajahan Belanda itu dinilai lemah dan tidak mampu mengikuti arus perkembangan modern. Kelemahan tersebut terjadi akibat adanya dualisme pada model pendidikan (sistem pendidikan Barat dan sistem pendidikan Islam) yang saling bertolak belakang. Pendidikan Islam yang ada di pesantren lebih berorientasi pada bidang keagamaan atau *ukhrawi*, sedangkan sekolah yang didirikan model Barat bersifat pada bidang umum atau *duniawi* (Pribadi, 2010, hlm. 49).

Lembaga yang didirikan oleh KH. Ahmad Dahlan ini menjadi tonggak penting gerakan pembaharuan pendidikan khususnya pendidikan Islam di Indonesia. Kemudian KH. Ahmad Dahlan memberikan kesempatan tidak hanya untuk kaum laki-laki saja, untuk perempuan pun dapat dengan mudah mengakses pendidikan yang sama, sehingga perjuangan yang dilakukan oleh KH. Ahmad Dahlan mengenai kesetaraan *gender* dalam pendidikan dapat terwujud. Tidak berhenti sampai di situ, Muhammadiyah melakukan modernisasi pendidikan terus menerus secara berkesinambungan dengan perubahan nama-nama setiap sekolahnya. Perubahan nama ini mempunyai tujuan agar sekolah-sekolah yang terafiliasi dengan Muhammadiyah lebih kelihatan keindonesiaan dan jelas semangat kebangsaannya (Daulai, 2019, hlm. 145).

Muhammadiyah yang berdiri tahun pada tahun 1912 dikenal sebagai gerakan Islam reformis-modernis. Masyarakat melihat bahwa Muhammadiyah termasuk sebagai gerakan Islam reformis atau sebagai gerakan *tajdid* atau pembaruan. Muhammadiyah disebut juga sebagai gerakan kebangkitan Islam (Subandi, 2018, hlm. 58). Untuk mempunyai pendidikan yang berkualitas, maka

Muhammadiyah melahirkan kurikulum yang dirancang guna menghadapi tantangan zaman. KH. Ahmad Dahlan mendesain kurikulum dan instrumen belajar secara modern yang diadopsi dari model pendidikan Belanda. Untuk pertama kalinya sebuah madrasah di Yogyakarta mengajarkan pelajaran umum dan agama secara bersamaan (Palahuddin, 2018, hlm. 74). Kurikulum ini memberikan kontribusi positif bagi mutu pendidikan yang unggul dan membawa pengaruh kuat terhadap perkembangan pendidikan Islam di Indonesia.

Pendidikan di Indonesia khususnya pendidikan Islam dari masa ke masa terus mengalami perubahan serta perkembangan ke arah yang dinilai baik ataupun ke arah yang kurang baik karena hal tersebut merupakan dinamika yang terjadi ketika pendidikan bersinggungan dengan perubahan-perubahan pada kebijakan pemerintah yang sedang berkuasa pada saat itu. Mengenai modernisasi pendidikan Islam dari Muhammadiyah yang dipelopori oleh KH. Ahmad Dahlan pada saat itu kebijakannya diatur oleh pemerintah kolonial Belanda. Maka kebijakan pada saat KH. Ahmad Dahlan mengenalkan modernisasi pendidikan Islam berbeda dengan pendidikan Islam pada masa pasca proklamasi, salah satunya pada tahun 1958/1959 lahir kebijakan yang mewajibkan siswa madrasah mempunyai hak dan kewajiban yang sama seperti siswa yang bersekolah di sekolah negeri (Jailani & Muhammad, 2019, hlm. 16), begitu pun kondisi pada masa Orde Baru yang dipimpin oleh Soeharto mempunyai kebijakan-kebijakan tersendiri terhadap pendidikan Islam.

Pada masa Orde Baru, pemerintahan mengimplementasikan beberapa kebijakan-kebijakan terhadap sistem pendidikan yang berlaku, salah satunya yaitu mengimplementasikan kebijakan untuk mengontrol pendidikan Islam dengan bermaksud agar bisa mempertahankan stabilitas politik dan mengendalikan pengaruh politik Islam. Kontrol atau pengawasan dari pemerintah yaitu melalui Departemen Agama yang menaungi institusi pendidikan Islam untuk mengatur program pendidikan yang berlaku. Kebijakan pendidikan pada masa Orde Baru mengarah pada penyeragaman, baik cara berpakaian maupun dalam segi pemikiran (Jailani & Muhammad, 2019, hlm. 21). Kemudian kebijakan pada masa Orde Baru ini terhadap pendidikan yang terlalu fokus pada aspek nasionalisme dan seolah-olah mengabaikan pendidikan agama secara mendalam, karena lebih

diarahkan pada semangat persatuan dan kesatuan yang berpedoman pada nilai-nilai Pancasila agar masyarakat dapat patuh terhadap kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Namun, lambat laun pendidikan mulai mengalami perkembangan khususnya pendidikan Islam yang didukung oleh kebijakan-kebijakan yang terus berupaya meningkatkan kemampuan pada aspek pendidikan Islam.

Selain Muhammadiyah yang mempunyai perhatian khusus pada modernisasi pendidikan Islam, Nahdlatul Ulama yang didirikan oleh KH. Hasyim Asy'ari dikenal sebagai organisasi Islam dengan tradisi dan kearifan lokal yang sangat kental. Berawal dari munculnya berbagai organisasi yang bersifat sementara, maka muncul kesepakatan dari para ulama pesantren untuk membentuk organisasi yang bernama Nahdlatul Ulama (NU) pada tanggal 31 Januari 1926 di Surabaya yang dipimpin oleh KH. Hasyim Asy'ari. Dalam perkembangannya, Nahdlatul Ulama kemudian menjadi salah satu organisasi Islam yang memiliki pengaruh terhadap gerakan pembaharuan Islam di Indonesia (Subandi, 2018, hlm. 58). Nahdlatul Ulama pun mendukung adanya pembaharuan terhadap pendidikan Islam atau modernisasi pendidikan Islam dan menyadari pentingnya pembaharuan pendidikan Islam dalam menghadapi tantangan zaman yang sangat kompleks.

KH. Hasyim Asy'ari kemudian mempunyai seorang cucu bernama Abdurrahman Wahid atau akrab disapa Gus Dur. Gus Dur yang memiliki latar belakang dari keluarga pendiri organisasi masyarakat Nahdlatul Ulama juga mempunyai gagasan pemikiran tentang modernisasi pendidikan Islam di pesantren. Bagi Gus Dur, pendidikan Islam harus menyatukan nilai yang ada dalam ajaran Islam dengan ilmu pengetahuan modern dan memahami Islam sebagai agama yang membawa nilai-nilai toleransi dan harmoni (Faisol, 2020, hlm. 82). Gus Dur memaknai modernisme sebagai sebuah pandangan hidup positif yang selalu ingin berubah dengan mengembangkan spirit tradisional yang ada (Budiyono, 2015, hlm. 30).

Upaya yang dilakukan oleh Gus Dur tentunya adalah untuk memodernisasi pesantren dengan mengintegrasikan pendidikan agama dan ilmu pengetahuan modern untuk menciptakan pendidikan holistik dan menyediakan akses

pendidikan bagi masyarakat luas. Gus Dur juga menginginkan adanya perubahan pada kurikulum dalam dunia pendidikan Islam yang beradaptasi dengan kebutuhan zaman. Dalam bukunya yang berjudul “Menggerakkan Tradisi” Gus Dur mengenalkan pesantren sebagai lembaga pendidikan yang memiliki berbagai potensi, yaitu dalam bidang keagamaan dan bidang umum. Hal tersebut juga diperkuat dengan gagasan Gus Dur mengenai “modernisasi pesantren”, di sini Gus Dur ingin mengatakan bahwa pesantren bukan lembaga yang ketinggalan oleh perkembangan zaman. Oleh karena itu, pesantren menjadi salah satu ikon pendidikan yang kreatif, mandiri, dan profesional (Faisol, 2020, hlm. 110).

Pada awal tahun 1970, Mukti Ali (Menteri Agama) berkeinginan untuk agar pesantren bertindak sebagai agen perubahan dalam upaya memfasilitasi pengembangan masyarakat Indonesia. Mukti Ali menunjukkan bahwa kelompok-kelompok yang di dalamnya terdapat pemuka-pemuka agama mempunyai komitmen dapat berperan sebagai penggerak dalam kehidupan bermasyarakat (Barton, 2016, hlm. 118). Pemikiran-pemikiran Gus Dur mengenai modernisasi dan pesantren dimulai sejak tahun 1970-an hingga setidaknya akhir tahun 1980-an, di mana pada era tersebut merupakan masa dilancarkannya program-program pembangunan oleh rezim Orde Baru (Budiyono, 2015, hlm. 18). Pemikiran Gus Dur mengenai pandangan Islam ini dianggap dapat menghambat dan menghalangi adaptasi dan pertumbuhan yang diperlukan untuk menghadapi tantangan zaman, serta dapat menjadi suatu penghalang bagi usaha yang dilakukan oleh rezim Orde Baru. Gus Dur tetap beranggapan bahwasanya pesantren mempunyai sifat yang dinamis untuk mengikuti gerakan perubahan yang akan dilakukan.

Orde Baru membuat kebijakan-kebijakan yang diberlakukan mengenai pembatasan kebebasan beragama, aktivitas-aktivitas keagamaan, organisasi-organisasi diawasi secara ketat, curiga terhadap gerakan-gerakan Islam dan aktivisme keagamaan, maka pendidikan Islam sering menghadapi diskriminasi seperti kurikulum yang kurang mendukung, infrastruktur yang kurang memadai, dan lain sebagainya. Keadaan ini yang mendorong tokoh-tokoh Islam menuntut agar madrasah dan pendidikan keagamaan dimasukkan menjadi bagian dari sistem pendidikan nasional. Reaksi terhadap sikap pemerintah yang mendiskriminasikan menjadi lebih keras dengan keluarnya Keputusan Presiden No. 34 Tahun 1972,

yang kemudian diperkuat dengan Instruksi Presiden No. 15 Tahun 1974. Keppres dan Inpres tersebut dianggap melemahkan madrasah dari pendidikan nasional. Sebagian umat Islam memandang bahwa Keppres dan Inpres tersebut merupakan salah satu cara untuk mengabaikan peran dan manfaat madrasah yang sejak zaman penjajahan telah diselenggarakan umat Islam (Yuningsih, 2015, hlm. 183).

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk mengangkat topik penelitian yang berjudul “KH. Abdurrahman Wahid dalam modernisasi pendidikan Islam di pesantren (1971-1980)”. Maksud dari topik penelitian ini adalah bagaimana gagasan pemikiran Gus Dur mengenai modernisasi pendidikan Islam ini dapat mempunyai pengaruh terhadap perkembangan pesantren. Pemikiran Gus Dur mengenai modernitas berfokus pada memahami dan mengadopsi nilai-nilai positif dari modernitas tanpa mengorbankan nilai-nilai agama dan tentunya tidak disikapi secara konfrontatif sehingga memberikan manfaat bagi masyarakat. Bagi kalangan yang tidak setuju atas gagasan pemikiran yang dikemukakan oleh Gus Dur mengenai modernisasi pendidikan Islam tentunya mempunyai keraguan akan hasil daripada pemikiran tersebut, yang menganggap bahwa hal tersebut dapat menyebabkan perpecahan dan ketakutannya akan pemikiran ini dapat membuka pintu bagi budaya Barat yang dianggap sebagai ancaman terhadap identitas serta moral Islam.

Kemudian untuk periodisasi, peneliti mengambil rentang tahun 1971-1980, karena pada periode tersebut Gus Dur menunjukkan dedikasinya melalui berbagai gagasan pemikiran yang selalu dikemukakan mengenai modernisasi pendidikan Islam, pluralisme, kesejahteraan sosial, dan gerakan keagamaan di Indonesia. Peneliti tertarik mengeksplorasi lebih dalam tentang pendidikan Islam yang tetap relevan dalam menghadapi tantangan zaman. Ketertarikan tersebut muncul dari peneliti ketika merasakan pesatnya perkembangan zaman yang sering dianggap tidak bisa sejalan dengan ajaran-ajaran Islam dan melihat sosok KH. Abdurrahman Wahid sebagai salah satu tokoh yang banyak dikagumi dan banyak dibahas dalam berbagai literatur. Oleh karena itu, peneliti melakukan penelitian ini atas dasar ingin membuktikan bahwa pendidikan Islam bisa beradaptasi dengan perkembangan zaman tanpa menghilangkan nilai-nilai yang ada dalam ajaran Islam dan penelitian ini juga tentunya didukung berbagai literatur yang

membahas mengenai gagasan pemikiran Gus Dur tentang modernisasi pendidikan Islam.

1.2 Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang penelitian yang diuraikan di atas, berikut ini adalah permasalahan pokok yang akan diteliti oleh peneliti mengenai "Bagaimana kiprah KH. Abdurrahman Wahid dalam modernisasi pendidikan Islam di pesantren (1971-1980)?" Untuk lebih mengarahkannya dalam pembahasan masalah, peneliti dapat merumuskan:

1. Apa latar belakang yang membentuk pemikiran KH. Abdurrahman Wahid dalam modernisasi pendidikan Islam?
2. Bagaimana gagasan pemikiran KH. Abdurrahman Wahid mengenai modernisasi pendidikan Islam di pesantren (1971-1980)?
3. Bagaimana respons masyarakat terhadap gagasan pemikiran KH. Abdurrahman Wahid mengenai modernisasi pendidikan Islam di pesantren?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah penelitian di atas maka tujuan utama dalam penelitian ini terbagi menjadi dua kategori, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Secara umum penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan informasi tentang kiprah KH. Abdurrahman Wahid dalam modernisasi pendidikan Islam di pesantren (1971-1980). Sementara itu, tujuan khusus dari penelitian ini adalah:

1. Menganalisis latar belakang yang membentuk pemikiran KH. Abdurrahman Wahid dalam modernisasi pendidikan Islam.
2. Mendeskripsikan gagasan pemikiran KH. Abdurrahman Wahid mengenai modernisasi pendidikan Islam di pesantren (1971-1980).
3. Mendeskripsikan respons masyarakat terhadap gagasan pemikiran KH. Abdurrahman Wahid mengenai modernisasi pendidikan Islam di pesantren.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah dipaparkan di atas, maka penelitian ini memiliki manfaat secara teoritis maupun praktis. Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terkait pemahaman mengenai KH. Abdurrahman Wahid serta menyumbangkan pemikiran baru untuk memperkaya pengetahuan sejarah dan memperdalam wawasan tentang KH. Abdurrahman Wahid dalam konteks modernisasi pendidikan Islam di pesantren (1971-1980).

1.4.2 Manfaat Praktis

Adapun manfaat praktis yang diharapkan oleh peneliti dari penelitian ini, di antaranya:

1. Hasil dari penelitian ini dapat memberikan wawasan dan rekomendasi bagi pengembangan pendidikan Islam di pesantren maupun lembaga pendidikan lainnya.
2. Dapat memperkuat pemahaman masyarakat terhadap sejarah pendidikan Islam di Indonesia, khususnya mengenai gagasan pemikiran KH. Abdurrahman Wahid.
3. Penelitian ini dapat dijadikan sumber bacaan yang kredibel, sehingga bisa memberikan inspirasi bagi generasi masa depan yang tertarik dengan pemikiran intelektual yang ada kaitannya dengan pendidikan Islam dan sejarah.
4. Dapat dijadikan sumber rujukan bagi guru dalam pengembangan kurikulum pendidikan Islam di SMA/Sederajat dan pengembangan materi Sejarah yang berkaitan dengan tokoh nasional, serta dapat memotivasi siswa untuk terlibat dalam pendidikan Islam yang inklusif.

1.5 Struktur Organisasi Skripsi

Berdasarkan Sistematika Penelitian Karya Ilmiah UPI Tahun 2021, struktur organisasi skripsi yang akan dijelaskan dalam penelitian ini terdiri dari beberapa bab, di antaranya:

Bab I Pendahuluan, menjelaskan gagasan pokok yang berkaitan dengan latar belakang penelitian. Pada bagian ini memuat tentang segala hal yang menjadi dasar peneliti untuk melakukan suatu penelitian dengan judul “KH. Abdurrahman Wahid dalam modernisasi pendidikan Islam di pesantren (1971-1980)”. Selain latar belakang penelitian, bab ini juga terdiri dari rumusan masalah penelitian, diawali dengan permasalahan utama dan beberapa poin-poin pertanyaan yang memiliki tujuan untuk mempermudah peneliti dalam mengkaji pembahasan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta struktur organisasi skripsi yang menjadi pedoman peneliti dalam penelitian skripsi.

Bab II Kajian Pustaka, bab ini memuat informasi mengenai penelitian yang akan dilakukan, pada bagian awal terdapat tabel *literature review* untuk membantu peneliti dalam mengupas dan membandingkan sumber rujukan yang didapatkan. Selain itu, pada bab ini terdapat penjelasan sejumlah konsep dari berbagai sumber literatur, antara lain buku, artikel jurnal, skripsi, dan tesis yang peneliti kutip guna mendukung peneliti dalam melakukan penelitian yang berkaitan dengan topik penelitian mengenai modernisasi pendidikan Islam di pesantren. Selain itu, bab ini memberikan penjelasan mengenai penelitian terdahulu serta sumber-sumber yang akan digunakan untuk menilai perbedaan antara penelitian yang akan dilakukan dan yang telah dilakukan.

Bab III Metode Penelitian, bab ini memuat pembahasan mengenai metode dan teknik penelitian yang akan peneliti gunakan dalam melakukan penelitian ini. Peneliti menggunakan metode historis yang terdiri dari heuristik, kritik sumber yang terbagi ke dalam dua fase yaitu kritik eksternal dan kritik internal, interpretasi, dan historiografi.

Bab IV Temuan dan Pembahasan, pada bab ini peneliti memaparkan penelitian yang sudah dilakukan, di mana rumusan masalah yang ada dalam bab I akan dijawab secara rinci pada bab ini berdasarkan sumber atau referensi sebagai acuan peneliti dalam melakukan penelitian. Pembahasan dalam bab ini dimulai dengan menganalisis latar belakang yang membentuk pemikiran Gus Dur dalam modernisasi pendidikan Islam, kemudian dilanjutkan dengan menjelaskan gagasan pemikiran Gus Dur mengenai modernisasi pendidikan Islam di pesantren (1971-1980), dan terakhir, peneliti akan memaparkan mengenai respons masyarakat

terhadap gagasan pemikiran KH. Abdurrahman Wahid mengenai modernisasi pendidikan Islam terhadap perkembangan pesantren. Pemaparan pada bab ini akan dijelaskan secara deskriptif untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah dibuat pada rumusan masalah penelitian secara mendalam.

Bab V Simpulan, Implikasi, dan Rekomendasi. Simpulan peneliti didasarkan pada kajian keseluruhan terhadap penelitian yang telah dilakukan. Selanjutnya, menjelaskan pentingnya temuan penelitian untuk memudahkan pemahaman dalam penelitian selanjutnya. Hasil temuan ini merupakan interpretasi peneliti mengenai pembahasan secara singkat. Peneliti menyadari bahwa penelitian ini jauh dari kata sempurna, maka dalam bab ini peneliti memberikan rekomendasi bagi siapa saja yang ingin melakukan penelitian agar tercipta hasil penelitian yang nantinya dapat bermanfaat bagi orang lain.